



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYUDI SUTOPO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 685506

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.390.500.000**

1. Tanah Seluas 851 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/200 m2 di NEGARA
[unknown], Rp. 1.300.000.000
4. Tanah Seluas 966 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/141 m2 di KAB / KOTA KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.050.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **544.000.000**

1. MOBIL, NISSAN LIVINA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RAIZE MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 225.000.000
3. MOBIL, BYD MINIBUS Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
249.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **36.121.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **255.299.109**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.225.920.109

III. HUTANG

Rp. 1.147.202.447

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.078.717.662

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.